

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

VISI : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang MADANI Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- MISI**
- Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
 - Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antarpemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan.
 - Mengembangkan industri pengolahan dan manufaktur yang berorientasi pasar dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar.
 - Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
 - Meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) Empat Lawang yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal.
 - Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kunci Utama (IKU)	Rumus	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab								
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	1.1 Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel	1.1.1	Opini BPK	Opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Ortala	BPKAD, Inspektorat							
				1.1.2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM		Seluruh PD	Ortala							
				1.1.3	Indeks Persepsi Korupsi	Nilai Indeks Persepsi Korupsi		Seluruh OPD	Inspektorat							
			1.2	Meningkatnya akuntabilitas daerah	1.2.1	Minimal nilai SAKIP	Nilai SAKIP		Seluruh OPD	Bappeda, Inspektorat dan Ortala						
2	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.	Tingkat Kemiskinan	2.1 Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat	2.1.1	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p> <i>P_i</i> = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-<i>i</i> <i>Q_i</i> = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-<i>i</i> Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika : 0 < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 < 0,5 = ketimpangan sedang 0,5 < 0,5 = ketimpangan tinggi </p>	BPS	BAPPEDA, Dinas Pertanian, Disperindag, Dinas Koperasi, UKM dan TK								
									2.2	Penurunan Angka PMKS	2.2.1	Persentase PMKS yang Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mandiri}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$	Definisi mandiri = mampu memenuhi kebutuhannya sendiri	Dinas Sosial	Dinas Sosial
									2.3	Peningkatan persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang	2.3.1	Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang tahun (n) / Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang tahun (n-1)}}{100}$		DPMDP3A	DPMDP3A
3	Meningkatnya kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga Konstan (Milyar	3.1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	3.1.1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH kelompok padi - padian+ umbi - umbian ++ skor PPH kelompok lain - lain	BPS, Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mengelola sumber daya daerah	Rupiah)						
		Laju Pertumbuhan ekonomi	3.2 Meningkatkan kesejahteraan petani	3.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks yang diterima petani (It) / Indeks yang dibayar petani (Ib) x 100		Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
			3.3 Meningkatkan daya beli masyarakat	3.3.1 PDRB per kapita atas dasar harga Konstan (Juta Rupiah)	Nilai PDRB / jumlah penduduk		BPS	Dinas Pertanian, Disperindag, Bappeda, Koperasi
			3.4 Meningkatkan Kinerja sektor pariwisata dan budaya	3.4.1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Jumlah PAD Pariwisata / Jumlah PAD x 100	PAD Pariwisata = Retribusi perhotelan, Rumah Makan, travel, obyek wisata	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
4	Mengembangkan industri pengolahan produk unggulan daerah	Persentase pertumbuhan industri pengolahan produk unggulan daerah	4.1 Mengembangkan industri kecil berbasis komunitas	4.1.1 Persentase pertumbuhan industri kecil berbasis komunitas	Jumlah pertumbuhan industri berbasis komunitas / pertumbuhan industri x 100		Disperindag	Disperindag, DPMD P3A, Dinas Pariwisata
5	Meningkatkan pendapatan daerah	Peningkatan jumlah pendapatan daerah (dalam Milyar)	5.1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	5.1.1 Persentase PAD terhadap pendapatan	Jumlah PAD / jumlah pendapatan x 100%		BP2RD	BP2RD
6	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK)	6.2 Menurunkan Pengangguran	6.2.1 TPT	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$		Bidang Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM dan TK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indek Pendidikan	7.1 Meningkatkan Cakupan Layanan Pendidikan	7.1.1 Angka melek Huruf	$LIT15+t = \frac{L15+t}{P15+t} \times 100$ Dimana: LIT15+t = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t L15+t = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun t P15+t = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.		DIKBUD	DIKBUD

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
8	Meningkatnya keimanan dan ketakwaannya masyarakat	Rasio komunitas Kajian Kegamaan per 1000 penduduk	8.1 Meningkatkan aktivitas kehidupan beragama masyarakat	8.1.1	Persentase komunitas Kajian Kegamaan aktif per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah komunitas kajian keagamaan yang aktif}}{\text{Jumlah kajian keagamaan}} \times 1000$	Kesra Setda	Setda		
9	Meningkatkan alokasi pendanaan untuk masyarakat	Persentase alokasi pendanaan untuk masyarakat	8.1 Meningkatkan alokasi pendanaan untuk kesejahteraan sosial	8.1.1	Persentase penurunan keluarga pra sejahtera	$\frac{\text{Jumlah keluarga pra sejahtera tahun (n-1)} - \text{jumlah keluarga pra sejahtera tahun n}}{\text{Jumlah keluarga pra sejahtera tahun (n-1)}} \times 100$	BPKAD	BPKAD		
10	Meningkatkan Derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat	IPM	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan	9.1.1	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	DINKES	DINKES		
				9.1.2	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	$\text{Cakupan JKN} = \frac{JPJKN}{JP} \times 100\%$ Cakupan JKN: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) JPJKN: Jumlah penduduk yang mendapat Jaminan Perlindungan kesehatan (JKN). JP: Jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama.	DINKES	DINKES		
				9.2	Meningkatkan Layanan Air Bersih / air minum layak	9.2.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$	Dinas PERKIM	Dinas PERKIM
				9.3	Meningkatkan pemukiman layak huni	9.3.1	Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$	Dinas PERKIM	Dinas PERKIM
				9.4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	9.4.1	Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	DIKBUD	DIKBUD
9.4.2	Harapan Lama Sekolah	$\text{Formula} \rightarrow \text{HLS}_t^e = FK \times \sum_{i=0}^{n-1} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS _t ^e : Harapan Lama Sekolah pada umur arif tahun t E _i ^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P _i ^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t i: Usia (i ₀ = 1, ..., 15) FK: Faktor koreksi pesantren Rasio santri makim = $\frac{\text{Jumlah bermakim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$ Jumlah santri sekolah dan makim = rasio santri makim x jumlah santri sekolah Faktor Koreksi = $\frac{\text{Jumlah santri sekolah dan makim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$	DIKBUD	DIKBUD						
11	Meningkatnya Infrastruktur Publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Rasio sarana prasarana publik dalam kondisi baik	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pembangunan infrastruktur dari desa/keurahan hingga kota	10.1	Proporsi jaringan jalan baik	Panjang jalan kondisi baik / Panjang jalan seluruhnya	DPUPR	DPUPR		
				10.1.2	Proporsi jaringan jembatan baik	Panjang jembatan kondisi baik / Panjang jembatan seluruhnya	DPUPR	DPUPR		
				10.1.3	Luasan sawah teraliri irigasi dalam kondisi baik	Hektar	DPUPR	DPUPR		
				10.2.1	Tingkat konektivitas wilayah		DPUPR	DPUPR		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					BLHD	BLHD	
			10.3	Pengendalian kualitas hidrup	10.2.1	Indek kualitas udara $IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$			
					10.2.2	Indek kualitas air $Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(\frac{C_i}{L_{ij}})^2 rata - rata + (\frac{C_i}{L_{ij}})^2 maksimum}{2}}$ $IP = \sqrt{((\frac{C_i}{L_{ij}}))^2 \cdot rata - rata + ((\frac{C_i}{L_{ij}}))^2 \cdot maksimum} / 2$ Os IP ≤1,00 baik memenuhi baku mutu 1,0 < IP ≤5,0 cemara ringan 5,0 < IP ≤10,0 cemara sedang 1,0 IP >10,0 cemara berat		BLHD	BLHD
					10.2.3	Indek kualitas tutupan lahan $PPMA = \frac{PMA\ T\ x - PMA\ Tahun\ x - 1}{PMA\ Tx} \times 100\%$		BLHD	BLHD
12	Meningkatkan Keamanan Wilayah dan perlindungan masyarakat	Angka Kriminalitas		Menurunkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan	11.1.1	Persentase penurunan gangguan K3 $\frac{Jumlah\ gangguan\ K3\ tahun\ n-1 - Jumlah\ gangguan\ K3\ tahun\ n}{Jumlah\ gangguan\ K3\ tahun\ n-1}$		Dinas SATPOL PP	Dinas SATPOL PP
		Persentase menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	11.2	Meningkatkan peran serta perempuan	11.2.1	Indek Pemberdayaan Gender (IPG) IPG = IPM Perempuan / IPM Laki-Laki		DPMDP3A	DPMDP3A
			11.3	Meningkatnya pemenuhan indikator kota layak anak	11.3.1	Persentase indikator kota layak anak yang terpenuhi $\frac{Jumlah\ indikator\ kota\ layak\ anak\ yang\ terpenuhi}{Jumlah\ indikator\ kota\ layak\ anak} \times 100$		DPMDP3A	DPMDP3A
13	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana		Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	12.1.1	Tingkat ketangguhan menghadapi bencana Skor	Desa tangguh bencana Utama = skor 51 -60 Desa tangguh bencana Madya = skor 36 -50 Desa tangguh bencana Pratam = skor 20 -35	BPBD	BPBD

